

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Yati dan Imami Nur Rachmawati. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam riset Keperawatan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Almanzani, N. N. (2022). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 7, Nomor 1, Feb 2022 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 7,*.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Aprilia, C. P., Sulistyaningsih, T., & Salahudin, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 353-366. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.81>
- Ayuningtyas. (2018). "Analisis Kebijakan Kesehatan". Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64.
- FIKRI, Nuraini dan CHALIK, Amal. (2022). *Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta*. **Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia**, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 2862-2874, feb. 2022. ISSN 2548-1398. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6377>
- Fitriyana dkk. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin*.
- Gagneux-Brunon A, Botelho-Nevers E, Bonneton M, Peretti-Watel P, Verger P, Launay O, Ward JK. (2021). *Public opinion on a mandatory COVID-19 vaccination policy in France: a cross-sectional survey*. *Clin Microbiol Infect*. doi: 10.1016/j.cmi.2021.10.016.
- Ingunn Skjesol, Jonathan Q Tritter. (2022). *The Norwegian way: COVID-19 vaccination policy and practice*. *Health Policy and Technology*, Volume 11, Issue 2, ISSN 2211-8837, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100635>.

- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- INDRIYANI, V., IDRIS, H., & WINDUSARI, Y. (2023). Analisis Faktor Implementasi Kebijakan Vaksin Covid-19 Pada Anak- Anak. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 213–222. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4122>
- Kemendes RI. (2021). KMK No. HK.01.07-MENKES-6424-2021 ttg Juknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19-signed. *Keputusan Menteri Kesehatan, 2019*, 1–181.
- Kemendes RI, & RI, K. (2021). PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Permenkes RI, 2019*, 33. <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>
- Kemendes RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *MenKes/413/2020, 2019*, 1–207. <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-hk0107menkes4132020>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/mendes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. *Keputusan Menteri Kesehatan, 2019*, 1–4.
- Kemendes RI. (2021). *SR.01.24/4/3309/2021 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Pada Anak usia 6-11 Tahun*
- Kemendes RI. (2022). *SR.02.06/II/266/2021 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Vaksinasi COV10-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun dan Penggunaan Vaksin COV10-19 Sinovac*
- Kulle, Hasnilawati dkk. (2021). *Implementation of Covid-19 Vaccination Policy At Bhayangkara Hospital Banjarmasin, As An Effort To Maximize The Role of Police In The Community*. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues (IJ3PEI)*, Vol. 1, No. 2, hal 103-114.
- Kusumawati, E., Sriyono, G., & Supriyadi, B. (2023). Pengaruh Dukungan Keluarga terhadap Keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 pada Anak (Usia 6 - 12 Tahun). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(3), 1235-1242. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i3.1758>

- Maleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muslim, H. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Orang Tua Dalam Penerimaan Vaksinasi Corona Virus Disease-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Kabupaten Dharmasraya. *Human Care Journal*, 7(2), 308. <https://doi.org/10.32883/hcj.v7i2.1675>
- Nugroho, D., Haris, S., & Irfan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 89–103. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2456>
- Nurhidayah, Ikeu dkk. (2021). Karakteristik Covid-19 pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, Vol. 4, No. 1, Hal 7-18. <http://dx.doi.org/10.26594/jika.4.1.2021.7-18>
- Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1135>
- Ode, S., Ikawati, N., Wijayanto, H., Dalupe, B., & Regif, S. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 162. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8242>
- Purwanto, dkk. (2012). "Implementasi Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmat, Alyakin Dachi. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta : Deepublish
- Riyanto, Agus. (2017). *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Saraswati, K., & Sunarta, I. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), hal 21 - 27. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2598>
- Seunghyun Lewis Kwon, Juhwan Oh. (2022). *COVID-19 vaccination program in South Korea: A long journey toward a new normal*. *Health Policy and Technology*, Volume 11, Issue 2, 2022, 100601, ISSN 2211-8837, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100601>
- Siregar, R. & I. P., Kebijakan, I., Covid, V., Puskesmas, D. I., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F.,

- & Surabaya, U. N. (2021). KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA Ruliani Siregar Indah Prabawati. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 10*, 471–486.
- Sucipto, Cecep Dani. (2020). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Sugioyo, (2029). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabet
- Sugioyo, (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabet
- Sutari., Herawati Idris dan Misnaniarti. (2022). *Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia: narrative review*. **Riset Informasi Kesehatan**, Volume. 11, No. 1, Hal. 71-81, may 2022. ISSN 2548-6462. doi: <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.637>
- Syamsu, J dkk. (2022). *Analysis Of Government Policy Regarding The Provision Of The Covid-19 Vaccination In Sijunjung Regency*. Conference Proceeding ICoGEMT+TECH, Vol.1, No. 1, Hal 1-8
- Utami, F. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.46730/jjana.v20i1.8021>
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik, Edisi 1 cetakan ke enam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Media Nusa Creative
- Winarno, Budi. (2012) *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Kedua*. Jakarta : CAPS
- Yarman, C. I., Wapada, W., & Rahayu, S. (2022). Analisis Perilaku Pemberian Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Sekolah Dasar Negeri 03 Cempaka Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6555>
- Yuliana, Y., & Artikel, R. (2022). Vaksinasi COVID-19 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Kesehatan (COVID-19 Vaccination from a Health Economic Perspective). *Jurnal Ilmu Medis Indonesia (JIMI)*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.35912/jimi.v2i1.1276>

Yulianto, Dian. (2021). *Covid-19 Update : New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. Yogyakarta : Arruzz Media

Yuliza, Wilda Tri dkk. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang*. JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan), Volume 6 No. 1 hal 162-167. <http://dx.doi.org/10.33757/jik.v6i1.511>

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat permohonan izin penelitian kepada KESBANGPOL Kota Banjarmasin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658
E-mail : fkunhas@gmail.com, website : <https://fkunhas.ac.id/>

No : 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 Oktober 2022

Yth.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
Di -
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Fransiska Dwi Hapsari**
Nomor Pokok : **K012202064**
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin**".

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Amran Razak, SE.,M.Sc (Ketua)
2. Dr. Muhammad Alwy Arifin, M.Kes (Anggota)

Waktu Penelitian : Oktober – Desember 2022

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes
NIP. 19760407 200501 1 004

Tembusan :

1. Dekan FKM Unhas
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal



Lampiran 2

Surat balasan izin penelitian oleh KESBANGPOL Kota Banjarmasin



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadinata No1, Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY
NOMOR : 072/1122 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar
Nomor : 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

- Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a. Nama	: FRANSISKA DWI HAPSARI
b. NIK/NIP/NIM/NPM	: K012202064
c. Alamat	: Jl. Parit Baru RT. 20 RW. 6 No. 55
d. Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin
e. Tujuan Penelitian	: Ijin Penelitian Untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin
f. Lokasi/ Tempat Penelitian	: Kota Banjarmasin
g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian	: 1 Bulan
h. Bidang Penelitian	: Ilmu Kesehatan Masyarakat
i. Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswi
j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab	: Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes.
k. Anggota Penelitian	: Fransiska Dwi Hapsari,
l. Nama Organisasi/Lembaga	: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

Ketentuan :

- Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
- Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
- Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
- Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- Arsip

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
RADA TANGGAL : 26 OCT 2022


I. H. RENO AZHARI, MP
Pembina Tk. 3
NIP. 19660614 199003 1 006

Lampiran 3

Surat izin penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Lampiran Surat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
Nomor : 070/071.409 -Y.SDK/Diskes/
Perihal : Permohonan Permintaan Data Penelitian

**FORMULIR VERIFIKASI PERMOHONAN PERMINTAAN DATA PENELITIAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN**

A. Data Pemohon

1. Nama : Fransiska Dwi Hapsari
2. NIP/NIM/..... : K012102064
3. Intansi/Institusi : Universitas Hasanuddin
4. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada Anak usia 6-11 tahun di Kota Banjarmasin

B. Dasar Surat Permohonan :
Rekomendasi/ Persetujuan Badan KESBANGPOL Pemerintah Kota Banjarmasin :
1. Nomor : 072/1122 - Sekr / Bakasbang pol
2. Tanggal : 26 Oktober 2022

C. Data Yang Dibutuhkan :


1. Program Vaksinasi Covid-19 pada Anak usia 6-11 tahun (rencana capaian jumlah target & lokasi).
2. Hasil capaian/persentase vaksinasi pada anak usia 6-11 th. Kota Banjarmasin
3. Hasil capaian vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 th per tiap puskesmas
4. SOP dan SK program vaksinasi covid-19.

D. Sumber Data :

1. Program Dinas Kesehatan : Surveilans dan Imunisasi ~~td~~ oleh Dinkes Kota
2. Puskesmas : Puskesmas di Kota Banjarmasin (capaian vaksinasi tertinggi & terendah)
3. Lain-lain : Wawancara dengan pihak berikut:
a. Kepala Dinkes Kota Bjm
b. Kasid Surveilans & Imunisasi
c. Penanggung jawab program imunisasi


Telah diverifikasi, Tanggal : 27 OCT 2022
Mengetahui : Banjarmasin, 27 Oktober 2022
Pemohon,
Fransiska Dwi Hapsari

Kepala Yth. Kepala Puskesmas:
.....
Diverifikasi, tanggal: 27 OCT 2022
Mengetahui:
Efbriyanti, SKM, N. 00



Lampiran 4

Surat permohonan izin penelitian di Puskesmas Kelayan Dalam


**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Pramuka Komp. Tirta Dharma (PDAM) Km.6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Telepon (0511) 4281348 Fax. (0511)4281348
E-mail : dinkesbjm@gmail.com, Website : dinkes.bjm.go.id

Nomor : 070/671.489-KSDK/Dinkes
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Permintaan data Penelitian

Banjarmasin, 10 November 2022


Kepada Yth.
Kepala Puskesmas
Kelayan Dalam
di - Banjarmasin

Sehubungan dengan permohonan permintaan data penelitian, bersama ini disampaikan bahwa surat rekomendasi/persetujuan dari Badan KESBANGPOL Pemerintah Kota Banjarmasin atas nama pemohon sudah diverifikasi di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Formulir Verifikasi Terlampir), selanjutnya mohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala Kota Banjarmasin untuk membantu pemberian data tersebut, Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Kesehatan


Lampiran 5

Surat permohonan izin penelitian di Puskesmas Pekapuran Raya

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Pramuka Komp. Tirta Dharma (PDAM) Km.6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Telepon (0511) 4281348 Fax. (0511)4281348
E-mail : dinkesbjm@gmail.com, Website : dinkes.bjm.go. id


Nomor : 070/671.489-KSDK/Dinkes
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Permintaan data Penelitian

Banjarmasin, 10 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas
Pekapuran Raya
di - Banjarmasin


Sehubungan dengan permohonan permintaan data penelitian, bersama ini disampaikan bahwa surat rekomendasi/persetujuan dari Badan KESBANGPOL Pemerintah Kota Banjarmasin atas nama pemohon sudah diverifikasi di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Formulir Verifikasi Terlampir), selanjutnya mohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala Kota Banjarmasin untuk membantu pemberian data tersebut, Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Kesehatan



Lampiran 6

Surat permohonan izin penelitian Puskesmas Pelambuan


**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Pramuka Komp. Tirta Dharma (PDAM) Km.6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Telepon (0511) 4281348 Fax. (0511)4281348
E-mail : dinkesbjm@gmail.com, Website : dinkes.bjm.go. id

Nomor : 070/071.489-KSDK/Dinkes
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Permintaan data Penelitian

Banjarmasin, 10 November 2022


Kepada Yth.
Kepala Puskesmas
Pelambuan
di - Banjarmasin

Sehubungan dengan permohonan permintaan data penelitian, bersama ini disampaikan bahwa surat rekomendasi/persetujuan dari Badan KESBANGPOL Pemerintah Kota Banjarmasin atas nama pemohon sudah diverifikasi di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Formulir Verifikasi Terlampir), selanjutnya mohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala Kota Banjarmasin untuk membantu pemberian data tersebut, Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Kesehatan


Lampiran 7

Surat permohonan izin penelitian Puskesmas Sungai Jingah

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Pramuka Komp. Tirta Dharma (PDAM) Km.6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Telepon (0511) 4281345 Fax. (0511)4281348
E-mail : dinkesbjm@gmail.com, Website : dinkes.bjm.go. id


Nomor : 070/071.489 -KSDK/Dinkes
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Permintaan data Penelitian

Banjarmasin, 10 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas
Sungai Jingah
di - Banjarmasin

Sehubungan dengan permohonan permintaan data penelitian, bersama ini disampaikan bahwa surat rekomendasi/persetujuan dari Badan KESBANGPOL Pemerintah Kota Banjarmasin atas nama pemohon sudah diverifikasi di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Formulir Verifikasi Terlampir), selanjutnya mohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala Kota Banjarmasin untuk membantu pemberian data tersebut, Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



A.n Kepala Dinas Kesehatan



Lampiran 8

Surat izin penelitian oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan rekomendasi izin penelitian beberapa SD di Kota Banjarmasin

Rekomendasi penelitian sd negeri sungai lulut 6

	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN <i>Alamat : Jl. P. Tendean No. 29 RT.40 RW.13 Kel. Gadang</i> <i>Telepon : 0511-3253373 Fax : 0511-3250914 e-mail : info@disdik.banjarmasinkota.go.id</i> <i>Banjarmasin 70231</i>
Nomor : 423.4/94014-Sekr/Dipendik/2022	Banjarmasin, 29 November 2022
Lampiran : -	
Perihal : Izin Penelitian/ Permintaan Data	
Kepada Yth. Kepala kesatuan bangsa dan politik kota Banjarmasin di - Banjarmasin	
REKOMENDASI	
Berdasarkan surat Saudara, Nomor: 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :	
1. Nama	: FRANSISKA DWI HAPSARI
2. N.I.M/ NIDN	: K012202064
3. Program Studi	: S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
4. Tempat	: SD NEGERI SUNGAI LULUT 6
5. Jangka Waktu	: 1 (satu) bulan
6. Judul	: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 PADA ANAK USIA 6-11 TAHUN DI KOTA BANJARMASIN"
Dengan Ketentuan:	
1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.	
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.	
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	
 Kepala Dinas, SURYADI, S.Pd., M.A Pembina Tk.I NIP. 196704131988041004	
Tembusan Yth : Kepala SD NEGERI SUNGAI LULUT 6	

Rekomendasi penelitian SD Negeri Murung Raya 5



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. P. Tendean No. 29 RT.40 RW.13 Kel. Gadang
Telepon : 0511-3253373 Fax : 0511-3250914 e-mail : info@disdik.banjarmasukota.go.id
Banjarmasin 70231

Nomor : 423.4/94012-Sekr/Dipendid/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/ Permintaan Data

Banjarmasin, 29 November 2022

Kepada
Yth. Kepala kesatuan bangsa dan politik kota
Banjarmasin
di -
Banjarmasin

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Saudara, Nomor: 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FRANSISKA DWI HAPSARI
2. N.I.M/ NIDN : K012202064
3. Program Studi : S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
4. Tempat : SD NEGERI MURUNG RAYA 5
5. Jangka Waktu : 1 (satu) bulan
6. Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 PADA ANAK USIA 6-11 TAHUN DI KOTA BANJARMASIN"

Dengan Ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



NURYADI, S.Pd., M.A

Pembina Tk.I

NIP. 196704131988041004

Tembusan Yth :
Kepala SD NEGERI MURUNG RAYA 5

Rekomendasi penelitian SD Negeri – SN Kuripan 2



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. P. Tendean No. 29 RT.40 RW.13 Kel. Gadang
Telepon : 0511-3253373 Fax : 0511-3250914 e-mail : info@disdik.banjarmasinkota.go.id
Banjarmasin 70231

Nomor : 423.4/94015-Sekr/Dipendid/2022 Banjarmasin, 29 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/ Permintaan Data

Kepada
Yth. Kepala kesatuan bangsa dan politik kota
Banjarmasin
di -
Banjarmasin

REKOMENDASI


Berdasarkan surat Saudara, Nomor: 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FRANSISKA DWI HAPSARI
2. N.I.M/ NIDN : K012202064
3. Program Studi : S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
4. Tempat : SD NEGERI-SN KURIPAN 2
5. Jangka Waktu : 1 (satu) bulan
6. Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 PADA ANAK USIA 6-11 TAHUN DI KOTA BANJARMASIN"

Dengan Ketentuan:



1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepala Dinas,
NURYADI, S.Pd., M.A
Pembina Tk.I
NIP. 196704131988041004

Tembusan Yth :
Kepala SD NEGERI-SN KURIPAN 2

Rekomendasi penelitian SDN Pekauman 3

	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN Alamat : Jl. P. Tendean No. 29 RT.40 RW.13 Kel. Gudang Telepon : 0511-3253373 Fax : 0511-3250914 e-mail : info@disdik.banjarmasinkota.go.id Banjarmasin 70231	
Nomor	: 423.4/94013-Sekr/Dipendik/2022	Banjarmasin, 29 November 2022
Lampiran	: -	
Perihal	: Izin Penelitian/ Permintaan Data	
Kepada Yth. Kepala kesatuan bangsa dan politik kota Banjarmasin di - Banjarmasin		
REKOMENDASI		
Berdasarkan surat Saudara, Nomor: 12499/UN4.14.1/PT.01.04/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :		
1. Nama	: FRANSISKA DWI HAPSARI	
2. N.I.M/ NIDN	: K012202064	
3. Program Studi	: S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	
4. Tempat	: SD NEGERI PEKAUMAN 3	
5. Jangka Waktu	: 1 (satu) bulan	
6. Judul	: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 PADA ANAK USIA 6-11 TAHUN DI KOTA BANJARMASIN"	
Dengan Ketentuan:		
1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.		
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.		
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.		
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya		
 Kepala Dinas, NURYADI, S.Pd., M.A Pembina Tk.I NIP. 196704131988041004		
Tembusan Yth : Kepala SD NEGERI PEKAUMAN 3		

Lampiran 9

Panduan dan pedoman wawancara

INFORMED CONSENT

Selamat pagi/siang/sore.....

Saya Fransiska Dwi Hapsari, Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, yang saat ini sedang menyusun tugas akhir (Tesis) dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Kota Banjarmasin”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr.....

untuk membantu memberikan informasi sehubungan dengan topik penelitian saya. Metode pengambilan informasi dalam penelitian ini dengan cara wawancara secara mendalam dan menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera). Adapun informasi yang saya dapatkan, saya hanya gunakan dalam keperluan penelitian saya serta menjaga kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dengan nama inisial.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Banjarmasin,
Peneliti

Oktober 2022

Fransiska Dwi Hapsari

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

No Urut :

Nama Informan :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Instansi :

No. Telp/Hp :

Dengan ini saya menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini tentang “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Kota Banjarmasin” dan saya akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai yang saya ketahui dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun metode pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti, saya menyetujui dengan cara wawancara, menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera) kepada saya.

Banjarmasin, Oktober 2022
Informan

(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

No Urut :

Nama Informan :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Instansi :

No. Telp/Hp :

No.	Indikator	Pertanyaan
1	Komunikasi	
	Transmisi	<p>1) Apakah sudah dilakukan sosialisasi pada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun untuk mengetahui tujuan dan maksud kebijakan? Siapa saja yang dilibatkan dalam sosialisasi?</p> <p>2) Apakah informasi terkait kebijakan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun sudah disebarkan pada masyarakat? Bagaimana strategi penyebaran informasinya tentang vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun?</p>
	Kejelasan	<p>5) Bagaimanakan mekanisme sosialisasi kebijakan tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 tahun di instansi bapak/ibu? Apakah informasi yang disosialisasikan jelas dan dapat dipahami?</p> <p>6) Bagaimanakan informasi tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 tahun yang sudah anda terima? Darimana sumber informasi yang anda dapat? Apakah cukup jelas tersampaikan?</p>
	Konsistensi	<p>1) Apakah sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 tahun disebarkan secara konsisten dan terus menerus?</p>

		2) Apa saja faktor hambatan dan pendukung yang ditemukan dalam komunikasi dengan pelaksana dan sasaran?
2	Sumber daya	
	SDM	1) Bagaimana ketersediaan SDM dalam vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? Apakah secara jumlah sudah tercukupi? 2) Bagaimana standar kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pelaksana? Apakah sudah sesuai?
	Anggaran	Bagaimana ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi? Bila tidak cukup, apa kendalanya?
	Fasilitas	Bagaimana ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? Apakah sudah sesuai dengan standar dan tercukupi? Bila belum memenuhi standar, apa kendalanya?
	Informasi dan kewenangan	Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan pada tempat pelayanan vaksinasi vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? Bila ada, apakah ada dalambentuk tertulis? Bila tidak ada, apa kendalanya?
3	Disposisi	
	Kognisi	Apakah bapak/ibu sudah memahami maksud dari tujuan dan sasaran pada kebijakan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun?
	Arah respon	1) Menurut anda, bagaimana kebijakan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? apakah kebijakan ini tepat? Apakah anda setuju dengan kebijakan ini?

		2) Bagaimana penerimaan masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun terhadap kebijakan ini?
	Intensitas disposisi	3) Apa keterlibatan bapak/ibu dalam pelaksanaan program? 4) Bagaimana peran aktif pelaksana kebijakan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun?
4	Struktur Birokrasi	
	SOP	1) Apakah ada SOP yang berlaku dalam pelaksanaan layanan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? bagaimana proses nya, apakah sudah sesuai SOP? Jika ada yang belum apa kendalanya? 2) Apakah ada kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun?
	Fragmentasi	1) Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19? Bila ada, bagaimana pembagian tugasnya? 2) Apakah ada kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? bagaimana alur koordinasinya dan apakah ada kendala? apa peran lembaga/instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan ini?

Lampiran 10

Matriks Analisis Hasil Temuan Penelitian Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin

1. Komunikasi

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Utama

Komunikasi	Emik (Sudut Pandang Informan Utama)		Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I1	I2	
Transmisi	Proses penyebaran informasi telah berupaya dilakukan secara bertahap dan berjenjang dari mulai tingkat pemerintah daerah yakni walikota, lalu kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini dinas kesehatan dan akhirnya melibatkan sektor regional seperti instansi lainnya untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 pada anak.	Transmisi juga diupayakan dan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, yang didukung dengan keterlibatan lintas sektor hingga seluruh pihak terkait, oleh puskesmas terutama pada sasaran sekolah, yang menjadi tujuan dan capaian utama keberhasilan program vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini.	Transmisi telah dilakukan dengan baik melalui pertemuan maupun sosialisasi, secara berjenjang dari mulai pembuat kebijakan, pelaksana dan sampai pada sasaran program. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/6424/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi <i>corona virus disease 2019</i> (COVID-19), sosialisasi dan koordinasi perlu dilakukan dengan seluruh pihak baik lintas sektor maupun lintas program yang terkait serta pemangku kepentingan lainnya.
Kejelasan	Kejelasan informasi ini sudah dengan jelas diberikan maksud, tujuan, dan sasaran kebijakan ini, dimana koordinasi dilakukan dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disebarluaskan berkaitan dengan jenis vaksin yang digunakan, kelompok yang menjadi sasaran vaksinasi, manfaat vaksin, keamanan vaksin, dan lokasi tempat pelayanan vaksin.	Kejelasan telah terwujud melalui sosialisasi yang telah diselenggarakan, dimana telah disampaikan tujuan serta maksud dari implementasi vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak agar memiliki pemahaman yang seragam. Informasi pun diberikan kepada masyarakat melalui spanduk, banner, radio, dan media sosial lainnya berfokus pada topik vaksin, kelompok sasaran vaksinasi, keamanannya, dan fasilitas layanan kesehatan yang tersedia.	Kejelasan informasi berupa upaya persamaan persepsi, sosialisai lanjutan dengan berbagai metode dan pendekatan pada seluruh sasaran. Strategi komunikasi meliputi informasi lengkap tentang pesan kunci, pesan pendukung, media yang digunakan serta monitoring dan evaluasi yang tercatat dalam dokumen induk Strategi Komunikasi Vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan
Konsistensi	Konsistensi berupa, rutinnnya, diadakan pertemuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. diikuti dengan koordinasi dengan bidang Kesehatan Masyarakat dan	Konsistensi terbentuk melalui penyebaran informasi terus-menerus melalui spanduk, baliho, dan update informasi di akun media sosial resmi Dinas Kesehatan Kota	Komunikasi untuk menyebarkan informasi penting tentang vaksinasi COVID-19 harus konsisten (terus menerus) melalui berbagai pilihan saluran komunikasi. Informasi diberikan juga dalam frekuensi

	(puskesmas) untuk memperbarui informasi terkait vaksin COVID-19 di akun media sosial resmi Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas.	Banjarmasin. Didukung pula dengan himbauan gencar agar segera melakukan vaksinasi, terutama karena sekolah-sekolah telah memulai pembelajaran tatap muka.	waktu yang berkelanjutan, dengan isi konten pelaksanaan berupa sosialisasi berbagai sektor hingga lembaga, sehingga secara konsisten kegiatan maupun informasi dapat sampai pada sasaran secara optimal dan menyeluruh.
Kendala	Informasi yang salah sudah terlebih dahulu tersebar, sehingga menjadi tantangan untuk proses penyebaran informasi di masyarakat.	Penerimaan masyarakat kurang terhadap informasi yang kami sampaikan. Karena adanya berita-berita yang belum tentu kebenarannya	Kendala yang dialami dalam proses keberhasilan komunikasi ialah, penyebaran ketidakbenaran informasi / berita hoax ke kalangan masyarakat, sehingga menciptakan stigma di kalangan sasaran / masyarakat terhadap pemahaman hingga keraguan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi anak.

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Biasa
1) informan Biasa

Komunikasi	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)						Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I3	I4	I5	I6	I7	I8	
Transmisi	Transmisi telah dilakukan melalui pertemuan dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan kerjasama lintas sektor dengan pihak kelurahan, babinsa (Bintara Pembina Desa), babinkamtibnas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan tokoh masyarakat di wilayah kami. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melibatkan mereka dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan imunisasi di sekolah-sekolah.	Sosialisasi secara terus-menerus dilakukan oleh puskesmas kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah. Sebelum setiap pelaksanaan vaksinasi, sosialisasi selalu diadakan dengan pihak orang tua. Misalnya, jika vaksinasi akan dilakukan besok, sosialisasi akan dilakukan hari ini atau 1 hari sebelumnya kepada orang tua. Tujuannya	Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, kami juga melakukan sosialisasi lintas sektor dengan melibatkan babinsa, kelurahan, dan babinkamtibnas. Setelah itu, kami melanjutkan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menjadi target vaksinasi untuk usia 6-11 tahun.	Sosialisasi dari Dinas Kesehatan kepada Puskesmas telah dilaksanakan, dilanjutkan hingga ke sekolah-sekolah dasar.	Dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang direspons oleh Dinas Pendidikan. Dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting yang dihadiri oleh kepala sekolah di seluruh kota Banjarmasin, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Untuk pelaksanaan vaksinasi di sekolah, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah di Banjarmasin. Puskesmas, lembaga masyarakat, dan Babinsa terdekat juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi di sekolah. Selanjutnya, surat pemberitahuan diberikan	Transmisi telah dilakukan secara terorganisir mulai dari kerjasama dengan lintas sektor, surat edaran dan kegiatan sosialisasi mulai dari dinas kesehatan kota ke puskesmas, dan puskesmas ke sasaran program vaksinasi anak 6-11 tahun yakni melalui sekolah-sekolah dasar yang ada di Banjarmasin, melibatkan kepala sekolah, guru, dan terutama orang tua siswa sendiri.

		adalah agar orang tua memahami maksud dan tujuan dari vaksinasi, sehingga mereka bersedia untuk memvaksinasi anak-anak mereka.			Setelah pertemuan tersebut, masing-masing sekolah menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa.	kepada orang tua siswa untuk menjelaskan sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sekolah.	
Kejelasan	Kami dengan jelas menyampaikan informasi yang penting mengenai vaksin COVID-19. Kami mengatasi kekhawatiran yang sering dialami oleh banyak orang tua terkait KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) atau kekhawatiran bahwa anak mereka akan sakit setelah divaksin. Selain itu, kami juga memberikan informasi jadwal layanan di Puskesmas melalui akun Instagram Puskesmas yang dapat diakses oleh semua orang.	Dalam sosialisasi vaksinasi, kami dengan jelas menyampaikan maksud dan tujuan vaksinasi dari perspektif kesehatan. Kami memberikan penjelasan yang jelas dan memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dipahami.	Telah disampaikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya vaksinasi agar mereka bersedia memvaksinasi anak-anak mereka.	Informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan sudah jelas dan telah disampaikan ke masyarakat melalui sosialisasi di sekolah-sekolah.	Kejelasan telah disampaikan baik melalui lisan ataupun melalui surat edaran. Sangat jelas sekali bahwa untuk percepatan vaksin covid usia 6 sampai 11 tahun.	Informasi yang diberikan kepada orang tua murid mengenai vaksinasi sangat jelas dan memenuhi kebutuhan mereka. Aturan mengenai pembelajaran tatap muka juga dijelaskan, di mana hanya siswa yang sudah divaksin yang diperbolehkan mengikuti pembelajaran offline, sedangkan siswa yang belum divaksin tetap mengikuti pembelajaran secara online.	Kejelasan telah disampaikan melalui surat edaran, sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi bagi anak di sekolah dasar.

Konsistensi	Setiap kali ada pelaksanaan vaksinasi di sekolah, orang tua murid selalu dikumpulkan dan diberikan penjelasan sebelum vaksinasi COVID-19 dilakukan. Selain itu, kami juga melayani mereka yang datang langsung ke Puskesmas, dan terus memperbarui jadwal layanan melalui akun Instagram Puskesmas.	Selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan terus memberikan informasi dan arahan bagi orang tua yang menolak vaksin	Dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah secara berulang-ulang dan kunjungan untuk vaksinasi juga dilakukan berulang-ulang. Hal ini dikarenakan tidak semua orang tua mau anaknya divaksin hanya dengan satu kali kunjungan.	Terus mengunjungi sekolah berulang-ulang dan selalu menyampaikan informasi vaksinasi COVID-19	Dalam memberikan informasi mengenai anjuran vaksinasi COVID-19, kami melakukan panggilan kepada orang tua murid sebanyak 2 hingga 3 kali. Karena respon orang tua beragam, ada yang bersedia, ragu-ragu, dan menolak. Bagi yang ragu dan masih menolak, kami terus melakukan pendekatan pribadi dengan orang tua untuk memberikan informasi penting mengenai vaksinasi dan aturan sekolah terkait jika tidak divaksin.	Pemberitahuan dan sosialisasi kepada orang tua tidak hanya dilakukan sekali karena tidak semua orang tua dapat hadir. Bagi yang tidak hadir, kami tetap memberikan informasi melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Kami juga mengadakan sesi sosialisasi kedua untuk yang belum mendapatkan informasi sebelumnya. Jika masih ada yang ragu atau menolak, kami melakukan panggilan personal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.	Komunikasi dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang. Informasi yang di sebarkan ke masyarakat selalu rutin dilakukan
Kendala	Tidak ada kendala, hanya respon orang tua yang menolak untuk vaksin	kendala yang dihadapi yaitu respon dari orang tua yang menolak vaksin	Respon orang tua yang tidak mau anaknya di vaksin	Tidak ada kendala	Respon orang tua yang beragam ada yang ragu-ragu dan menolak	Saat sosialisasi tidak semua orang tua dapat hadir sehingga harus dilakukan berkali-kali	Komunikasi sudah dilakukan secara optimal, namun yang menjadi kendala saat dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tidak semua orang tua siswa yang hadir.

							Sehingga harus dilakukan komunikasi secara personal.
--	--	--	--	--	--	--	--

2) Lanjutan Matriks Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Biasa

Komunikasi	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)						Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I9	I10	I11	I12	I13	I15	
Transmisi	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19 anak. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk memberikan anjuran mengenai vaksinasi COVID-19 anak. Selanjutnya, surat pemberitahuan dikirim kepada orang tua siswa untuk memberikan informasi terkait vaksinasi. Dilakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai vaksinasi COVID-19 anak.	Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan ada sosialisasi dan surat edaran tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk anak	Pihak sekolah mengirim undangan untuk sosialisasi vaksinasi anak, dan orang tua harus hadir.	Adanya undangan untuk pertemuan orang tua terkait vaksinasi COVID-19.	Adnya kegiatan pertemuan seluruh orang tua siswa yang usia anaknya 6-11 tahun, sebelum diadakan vaksinasi di sekolah.	Transmisi dilakukan dengan menerapkan berbagai metode dalam penyebaran informasi, dimulai dari melibatkan petugas penyuluh di puskesmas. Kami memiliki jejaring dengan 27 puskesmas yang dapat kami koordinasikan. Di Dinas Kesehatan, kami memanfaatkan kendaraan promosi kesehatan, seperti mobil promosi, serta memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, website,	Transmisi telah dilakukan secara terorganisir mulai dari kerjasama dengan lintas sektor, surat edaran dan kegiatan sosialisasi mulai dari dinas kesehatan kota ke puskesmas, dan puskesmas ke sasaran program vaksinasi anak 6-11 tahun yakni melalui sekolah-sekolah dasar yang ada di Banjarmasin, melibatkan kepala sekolah, guru, dan terutama orang tua siswa sendiri.

						YouTube, dan podcast.	
Kejelasan	Sudah disampaikan dengan jelas melalui pertemuan kepala sekolah dan pihak puskesmas yang datang	Disampaikan dengan jelas oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan melalui pertemuan dan surat edaran	Dalam penjelasan tersebut, tujuan, manfaat, dan risiko pasca imunisasi (KIPI) vaksinasi disampaikan. Selain itu, ditekankan bahwa vaksinasi juga merupakan syarat untuk anak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.	Semua informasi mengenai tujuan dan keamanan vaksin telah disampaikan, tetapi masih merasa ragu. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman pribadi terkait KIPI, di mana Anda mengalami sakit setelah vaksinasi.	Informasi diterima dengan jelas, dan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengonfirmasi berita di luar sana.	Pesan kunci yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan panduan yang diterima dari Kementerian Kesehatan adalah mengenai pentingnya vaksinasi untuk anak-anak, rentang usia yang menjadi target vaksinasi, manfaat vaksinasi, dan jenis vaksin yang digunakan.	Kejelasan telah disampaikan melalui surat edaran, sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi bagi anak di sekolah dasar.
Konsistensi	Hanya dilakukan sekali melalui surat yang diberikan kepada orang tua	Komunikasi secara berulang-ulang untuk mencapai 100% partisipasi, tidak hanya sekali. Kami menggunakan berbagai metode seperti surat, pertemuan	Pihak sekolah secara berulang kali memberikan informasi kepada orang tua, bahkan menghubungi mereka secara langsung.	Pihak sekolah memberikan informasi secara berulang-ulang, bahkan melakukan kontak langsung dengan orang tua dari sekolah.	Hanya sekali lewat surat dan pertemuan di sekolah sebelum pelaksanaan vaksin	Informasi telah diumumkan secara konsisten dan terus-menerus melalui semua platform media sosial kami. Selain itu, kami juga aktif sebagai narasumber di TVRI, TV lokal,	Komunikasi dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang. Informasi yang di sebar ke masyarakat selalu rutin dilakukan

		orang tua, dan grup WhatsApp. Selain itu, kami melakukan pendekatan personal dengan mendata kembali yang belum divaksin dan menemui orang tua secara personal.				dan bekerja sama dengan RRI Pro 2 untuk siaran interaktif yang dijadwalkan setiap hari Kamis.	
Kendala	Informasi hanya dilakukan sekali dan hanya melalui surat sehingga informasi tidak jelas diberikan ke orang tua	Kendalanya respon orang tua yang menolak vaksin	Tidak ada kendala	Masih ragu dengan keamanan vaksin khususnya terhadap KIPi	Tidak ada kendala	Respon masyarakat yang masih menolak vaksin COVID-19	Komunikasi sudah dilakukan secara optimal, namun yang menjadi kendala saat dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tidak semua orang tua siswa yang hadir. Sehingga harus dilakukan komunikasi secara personal.

2. Sumber Daya

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Utama

Sumber Daya	Emik (Sudut Pandang Informan Utama)		Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I1	I2	
Sumber Daya Manusia	Optimalisasi tim di puskesmas, jika kegiatan di lapangan bertepatan dengan kegiatan masyarakat, maka akan dilakukan kerjasama dengan kelurahan, bintang pembina desa (babinsa) yang terdiri dan merupakan satuan TNI AD di tingkat koramil serta Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terdiri dari satuan POLRI. Tim vaksinator yang bertugas telah mengikuti pelatihan, dan diselenggarakan pula pelatihan bagi tenaga baru.	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang terbatas, difokuskan upaya pada tenaga yang ada di 27 puskesmas yang tersedia. Selain itu, kerjasama dengan TNI dan POLRI akan memberikan bantuan tambahan. Kemudian, untuk meningkatkan kompetensi, diperlukan sertifikat pelatihan vaksinator, yang dapat diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kota Banjarmasin. Pelatihan tersebut tidak hanya ditujukan untuk petugas di Puskesmas, tetapi juga untuk relawan vaksinator.	Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 salah satu persyaratan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Permenkes RI No. 10 tahun 2021 ttg pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 pasal 24. Tenaga kesehatan yang akan menjadi vaksinator harus memenuhi kompetensi dengan melakukan pelatihan untuk vaksinator dan menambah tenaga relawan vaksinator serta bekerja sama dengan instansi lainnya.

Fasilitas	Kepala Dinkes telah menentukan puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19. Setiap lokasi telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan tersebut.	Di puskesmas, seluruh fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan vaksinasi sudah tersedia secara lengkap. Mulai dari meja, kursi, laptop, printer, perlengkapan tulis kantor (ATK), koneksi WIFI, hingga alat kesehatan seperti termogun dan tensimeter, serta alat pelindung diri (APD) untuk tim medis.	Permenkes RI No. 10 tahun 2021 ttg pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 pasal 21, fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa puskesmas, klinik, rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan pelabuhan. Semua puskesmas dan fasyankes lainnya yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Anggaran	Pendanaan kami berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan istilah yang kami sebut sebagai DAK non fisik. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan pertemuan guna advokasi dan koordinasi, kebutuhan cetak yang diperlukan, biaya operasional, kebutuhan informasi dan edukasi (KIE), biaya pelatihan, surveilan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dan lain sebagainya.	Pendanaan vaksinasi COVID-19 telah diatur oleh Permenkes untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Dana berasal dari APBN dan APBD.	Anggaran sudah diatur di dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 yang menggunakan APBN dan APBD.
Informasi Kewenangan	Informasi dan wewenang terkait, Kepala Dinas Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk Puskesmas, rumah sakit, dan klinik sebagai penyelenggara layanan vaksinasi COVID-19.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) menyatakan bahwa puskesmas di Kota Banjarmasin dan fasyankes lainnya akan berfungsi sebagai lokasi pelayanan vaksinasi COVID-19 dan penanganan KIPI. Dalam SK tersebut, ditetapkan bahwa kepala puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan dengan membentuk tim yang ditunjuk oleh masing-masing kepala puskesmas.	Dinas Kesehatan Kota memiliki wewenang tertinggi dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Biasa

Sumber Daya	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)					Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I3	I4	I5	I6	I14	
Sumber Daya Manusia	Dengan adanya keterbatasan tenaga	Meskipun pelayanan di	Seluruh anggota tim telah dilibatkan	Adanya kepuasan dengan jumlah tim	Tidak ada pernyataan	Ada keterbatasan tenaga, sehingga melibatkan seluruh

	<p>dan jumlah target sasaran yang tinggi di wilayah Puskesmas, kami telah menambahkan pegawai CPNS yang sangat membantu. Satu tim terdiri dari empat orang yang bertanggung jawab atas administrasi, proses screening, vaksinasi, dan observasi. Tidak semua anggota tim mengikuti pelatihan vaksinator, hanya mereka yang sudah mengikuti pelatihan akan ditempatkan di bagian vaksinasi.</p>	<p>Puskesmas sudah cukup memadai, namun karena mengejar target capaian, kami juga melakukan layanan di lapangan. Akibatnya, terjadi keterbatasan tenaga ketika harus memberikan pelayanan di dua lokasi yang berbeda. Pelatihan hanya diberikan kepada sebagian tim, yaitu dua dokter, satu bidan, dan satu perawat.</p>	<p>dalam program ini. Dimana, terdapat tiga tim, di mana setiap tim terdiri dari delapan orang dengan tugas yang terbagi, seperti pendaftaran, skrining, vaksinator, pencetakan kartu, dan penginputan data ke aplikasi Pcare. Hanya anggota tim yang bertugas sebagai vaksinator yang mengikuti pelatihan. Mengenai penggunaan aplikasi Pcare, kami telah mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan mengenai cara penggunaannya.</p>	<p>yang ada karena target sasaran tidak sebanyak puskesmas lain. Semua anggota tim telah mengikuti pelatihan vaksinator, dan juga mengadakan pertemuan untuk membahas penggunaan aplikasi Pcare.</p>	<p>petugas puskesmas untuk terlibat dalam kegiatan Vaksinasi COVID-19.</p>	
<p>Fasilitas</p>	<p>Sarana dan prasarana yang diperlukan telah terpenuhi dengan baik, termasuk konektivitas Wi-Fi atau internet yang lancar tanpa kendala. Semua logistik vaksin telah tersedia melalui Dinas Kesehatan. Namun, saat ini stok vaksin untuk anak-anak masih kosong dan belum ada pasokan yang tersedia hingga saat ini.</p>	<p>Tidak ada masalah dengan fasilitas, semuanya tersedia. Semua kebutuhan vaksinasi diperoleh dari dinas kesehatan. Namun, stok vaksin, terutama yang untuk anak-anak, sudah lama kosong.</p>	<p>Fasilitas lengkap tidak ada kendala. Namun, persediaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak telah lama habis.</p>	<p>Tidak ada hambatan, fasilitas yang diperlukan untuk vaksinasi COVID-19 telah tersedia. Kebutuhan logistik telah dialokasikan oleh Dinas Kesehatan.</p>	<p>Untuk persediaan vaksinasi, logistiknya didapatkan melalui alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami menerima unit vaksin sesuai dengan alokasi tersebut, kemudian kami membagikannya kepada Puskesmas. Namun, selama 3 bulan terakhir, stok vaksin COVID-19</p>	<p>Fasilitas sudah tersedia, hanya masalah logistik ketersediaan vaksin COVID-19 jenis SINOVAQ untuk anak sudah kosong sejak beberapa bulan yang lalu.</p>

					Sinovac telah habis, dan kami belum menerima informasi terkait ketersediaan vaksin dari Instalansi Farmasi Provinsi Kalimantan Selatan.	
Anggaran	Semua alokasi anggaran diperoleh dari dinas terkait, dan tugas kami adalah menerima barang sesuai kebutuhan serta melaporkan barang yang diperlukan.	Anggaran tidak ada masalah, semua kebutuhan kegiatan vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan	Seluruh anggaran berasal dari Dinas Kesehatan. Hanya dalam hal mencetak kartu, kami masih menggunakan metode manual yang tidak memungkinkan untuk melakukan penginputan data. Namun, jika terdapat kendala dalam menggunakan metode manual tersebut, kami menggunakan anggaran dari puskesmas. Secara keseluruhan, anggaran tidak menjadi masalah.	Tidak ada anggaran khusus, semua kebutuhan dari Dinas Kesehatan	Tidak ada pernyataan	Tidak ada anggaran khusus, karena kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diberikan ke Puskesmas berupa logistik
Informasi Kewenangan	Ada penunjukkan tim vaksinasi melalui SK kepala Puskesmas	informasi dan kewenangan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing pemegang program. Untuk kegiatan vaksin	Adanya Surat Keputusan kepala puskesmas dengan membentuk tim vaksinasi	Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kegiatan imunisasi, yang menjadi tanggung jawab koordinator imunisasi	Tidak ada pernyataan	Informasi dan kewenangan sesuai dengan tupoksi pemegang program khususnya koordinator imunisasi dan pembentukan tim vaksinasi melalui Surat Keputusan kepala puskesmas

		COVID-19 yaitu tugas koordinator imunisasi				
Kendala	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak	Ketersediaan stok vaksin COVID-19 untuk anak

3. Disposisi / Sikap

a. Matriks Analisis Implementasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh Informan Utama

Disposisi / Sikap	Emik (Sudut Pandang Informan Utama)		Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I1	I2	
Kognisi	Tujuan dan sasaran kebijakan ini telah dinyatakan dengan jelas berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, instruksi tersebut diteruskan melalui instruksi dari Gubernur dan kemudian dilanjutkan oleh Walikota. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan penguatan tim di lapangan agar siap untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.	Dalam proses sosialisasi, telah disampaikan informasi yang memungkinkan kami sebagai pelaksana memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak.	Maksud, tujuan dan sasaran kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun sudah dipahami oleh pelaksana/implementor. Selanjutnya dilakukan penguatan tim untuk menindaklanjuti kebijakan.
Arah Respon	Tentunya kebijakan ini telah melalui berbagai kajian di tingkat pusat. Di daerah, mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	Kebijakan ini merupakan langkah yang baik dan tepat, terutama karena anak-anak mulai kembali ke sekolah dengan pembelajaran tatap muka, sehingga penting bagi mereka untuk divaksinasi. Mungkin pemerintah pusat perlu menyesuaikan langkah-langkahnya, terutama dalam memastikan ketersediaan vaksin agar tidak ada kekosongan saat diperlukan percepatan vaksinasi. Selain itu, kebijakan ini juga harus sejalan dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan vaksinasi yang diperlukan untuk perjalanan udara. Saat ini, langkah-langkah yang diambil sudah bagus, seperti mewajibkan vaksinasi untuk kebijakan penerbangan.	Informan setuju dan mendukung kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun
Intensitas Disposisi	Dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kami melakukan koordinasi internal di Dinas Kesehatan dan juga dengan	Sebagai tenaga kesehatan, kita harus memberikan contoh yang baik. Salah satunya adalah dengan menerima vaksin sendiri.	Informan berperan aktif dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun seperti menjalankan tugas, menjadi role

	sektor-sektor terkait untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak dapat dilakukan dengan baik.	Selain itu, kita terus menghimbau masyarakat yang belum divaksinasi untuk segera melakukannya, selama stok vaksin masih tersedia.	model dan aktif memberikan informasi terkait vaksin.
--	--	---	--

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan Biasa

1) Informan Biasa

Disposisi / Sikap	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)				Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I3	I4	I5	I6	
Kognisi	Maksud, tujuan, dan sasaran terkait kebijakan tersebut telah terkemuka dengan jelas, sehingga kami siap untuk melaksanakannya.	Maksud tujuan dan sasaran target dari kebijakan ini sudah dipahami	Tidak ada kesulitan untuk memahami kebijakan vaksinasi COVID-19 untuk anak	Sudah jelas dan dipahami untuk segera dilaksanakan	Maksud, tujuan dan sasaran kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun sudah dipahami oleh informan
Arah Respon	Pemerintah sudah memberikan pressure yang kuat untuk pelaksana dan masyarakat.	selalu mendukung dan setuju dengan kegiatan yang sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Sebagai nakes, mendukung kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan ini untuk menanggulangi pandemi COVID-19	Informan setuju dan mendukung kebijaka vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun
Intensitas Disposisi	100% tenaga kesehatan sudah divaksin semua sebagai contoh untuk masyarakat	Kami mendukung kebijakan ini dengan berkomitmen untuk melaksanakannya secara optimal dan maksimal, terutama di wilayah kerja Puskesmas kami.	Semua berperan aktif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19	Kami semua di sini terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi.	Informan berperan aktif dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun seperti menjalankan tugas, menjadi role model dan aktif memberikan informasi terkait vaksin.

2) Lanjutan Informan Biasa

Disposisi / Sikap	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I11	I12	I13	
Kognisi	Tidak ada pernyataan	Tidak ada pernyataan	Tidak ada pernyataan	
Arah Respon	Setuju dengan kebijakan untuk tujuan baik dan kemanan terjamin	Tidak setuju karena takut dengan KIPI, namun tetap menerima anaknya di vaksin COVID-19 agar bisa sekolah offline	Kurang setuju karena pengalaman orangtua terhadap KIPI. Jadi melihat dulu anak-anak lain sebelum anaknya di vaksin	Informan yang mewakili orang tua murid ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung namun terpaksa memvaksin anaknya karena aturan yang berlaku
Intensitas Disposisi	Tidak ada pernyataan	Tidak ada pernyataan	Tidak ada pernyataan	

4. Struktur Birokrasi

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan Utama

Struktur Birokrasi	Emik (Sudut Pandang Informan Utama)		Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I1	I2	
SOP (Standard Operating Procedure)	Tentunya, kami mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.	Di setiap Puskesmas, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, SOP yang mengatur distribusi vaksin dan penyimpanan vaksin juga telah ditetapkan.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Fragmentasi	Struktur organisasi kami telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kota Banjarmasin No. 66 Tahun 2022. Dalam hal vaksinasi, tugas dan tanggung jawabnya menjadi wewenang dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan seluruh jajarannya.	Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama. Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan advokasi dan koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pendidikan yang mengawasi sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran yang membantu meningkatkan cakupan vaksinasi dengan mewajibkan vaksinasi untuk proses pembelajaran tatap muka. Terjalin kerjasama dengan kepala beberapa SKPD, seperti kepala PDAM, untuk meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 pada anak-anak. Mereka memberikan bingkisan atau reward kepada anak-anak yang bersedia divaksinasi sebagai insentif untuk partisipasi mereka.	Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun di Kota Banjarmasin mengacu pada struktur organisasi yang diatur oleh PERWALI No. 66 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan aturan di sekolah. Selain itu, kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah lain juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan tingkat vaksinasi COVID-19.



b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan Biasa

Struktur Birokrasi	Emik (Sudut Pandang Informan Biasa)				Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	I3	I4	I5	I6	
SOP (Standard Operating Procedure)	SOP untuk alur pelayanan, penyimpanan vaksin,	SOP untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah	Semua SOP yang diperlukan telah tersedia dan lengkap.	SOP yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk pelaporan,	Informan menyatakan adanya SOP untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dan sudah

	<p>dan pembuangan limbah telah tersedia secara lengkap. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara teratur dengan melaporkan kepada dinas terkait, sementara data vaksinasi telah diintegrasikan ke dalam sistem P-CARE.</p>	<p>tersedia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan yang mengatur Petunjuk Teknik Pelaksanaan Vaksinasi.</p>	<p>Pelaporan dilakukan setiap hari, sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan saat ada kegiatan Lokakarya/Mini Lokakarya (lokmin).</p>	<p>kami menggunakan Pcare, sebuah platform yang dapat diakses oleh pihak Dinas Kesehatan, di mana kami mengisi data yang diperlukan.</p>	<p>dilakukan monitoring dan evaluasi.</p>
Fragmentasi	<p>Struktur organisasi kami mengikuti struktur yang ada di Puskesmas. Vaksinasi termasuk dalam layanan imunisasi, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab dari koordinator imunisasi. Puskesmas melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu, puskesmas juga menjalin kerjasama dengan pihak kecamatan/kelurahan untuk mengadakan gerakan vaksinasi massal. Tim vaksinator kami berperan aktif dalam kegiatan tersebut.</p>	<p>Tugas dan tanggung jawab pelayanan imunisasi berada di bawah koordinator imunisasi sesuai dengan job desk. Namun, terdapat tim vaksin yang bertugas untuk berbagi tanggung jawab dalam memberikan layanan vaksinasi COVID-19. Peran lintas sektor khususnya kecamatan dan kelurahan belum berjalan optimal.</p>	<p>Berdasarkan tim vaksinasi, tugas telah dibagi berdasarkan fungsi masing-masing. Meja satu bertanggung jawab untuk registrasi di loket, meja dua dilakukan skrining oleh dokter dan gizi, meja tiga adalah tempat vaksinator beroperasi, dan meja empat bertugas untuk input data. Kerjasama lintas sektor dengan sekolah dasar dan kelurahan.</p>	<p>Penugasan Tim Vaksin dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan. Tim saling membantu dan turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi. Koordinator Tim membuat jadwal pelaksanaan, serta melakukan koordinasi dengan sekolah dan kelurahan terkait.</p>	<p>Penanggung jawab dalam program vaksinasi pada puskesmas merupakan tugas koordinator imunisasi. Kerjasama lintas sektor dilakukan dengan sekolah dasar di wilayah puskesmas masing-masing serta berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan</p>



Lampiran 11

SOP Mengenai Distribusi Vaksinasi COVID-19

 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN	NOMOR SPO : SPO/IFK/440-001/1/2021 TGL. PEMBUATAN : 14 Januari 2021 TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : 14 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH :  Dr. Machil Rjaya, S.H., M.H. NIP. 197011241991011004
	NAMA SPO : DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
DASAR HUKUM 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami konsep manajemen pengelolaan barang milik daerah 2. Memiliki pemahaman dan pelaksanaan metode pengelolaan vaksin dan logistik lainnya 3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Terkait
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Vaksin Carrier 2. Cool Pack / kotak dingin cair 3. Alat Pemantau Paparan Suhu
PERINGATAN : Dalam menyerahkan vaksin dan logistik lainnya harus sesuai antara Surat Berita Barang Keluar (SBBK) dengan fisik vaksin dan logistik lainnya tersebut, jika tidak sesuai akan terjadi ketidakcocokan antara dokumen dengan fisiknya, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan dari vaksin dan logistik lainnya tersebut	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual


Lampiran 12

SOP penerimaan dan penyimpanan vaksinasi COVID-19

 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN	NOMOR SPO : SPO/IFK/440-12/1/2021
	TGL. PEMBUATAN : 14 Januari 2021
	TGL. REVISI : -
	TGL EFEKTIF : 14 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN Dr. Machli Ryadi, S.H., M.H. NIP. 19701124 199101 1 004
NAMA SPO : PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN VAKSIN COVID 19	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 3. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	1. Memahami konsep manajemen pengelolaan barang milik daerah 2. Memiliki pemahaman dan pelaksanaan metode pengelolaan vaksin dan logistik lainnya 3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Terkait
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SPO Distribusi Vaksin Covid 19	1. Unit Penyimpanan : Chiller / freezer 2. Cool Pack / kotak dingin cair 3. Vaksin
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Unit Penyimpanan akan bekerja paling baik jika ditempatkan di area dengan suhu ruang (20° C - 25° C) 2. Memastikan unit penyimpanan mempertahankan suhu yang sesuai, suhu antara 2° C s.d 8° C untuk chiller dan -50° C s.d -15° C untuk freezer	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Lampiran 13

SK PENUNJUKKAN PUSKESMAS DAN FASYANKES LAIN

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Pramuka Kompl. Tirta Dharmas (PDAM) km.6 Banjarmasin Kode Pos 70249
Telepon (0511)4281348 Faks. (0511)4281348
E-mail : dinkes@banjarmasinkota.go.id Website : www.dinkes.banjarmasin.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 442.12/534- P2P/DISKES/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PUSKESMAS DAN FASYANKES LAIN YANG AKAN MEMBERIKAN
LAYANAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin perlu penunjukan puskesmas dan fasyankes lain yang akan memberikan layanan vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tentang Penunjukan Puskesmas dan Fasyankes lain yang akan Memberikan Layanan Vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);

lampiran 14

Bukti Dokumentasi Kegiatan Penelitian

	<p>Foto Kegiatan Pelatihan Vaksinator</p>
	<p>Foto Kegiatan Pelatihan Voluntir Vaksinator</p>
	<p>Foto Bersama Kepala SDN Sungai Lulut 6 Banjarmasin</p>
	<p>Foto Bersama Kepala Sekolah SDN Murung Raya 5</p>

		<p>Foto Bersama KASSI PROMKES dan Pemberdayaan Masyarakat DINKES Kota Banjarmasin</p>
		<p>Foto Bersama Kepala Instalasi Farmasi DINKES Kota Banjarmasin</p>
		<p>Foto Bersama KASSI Surveilans dan Vaksinasi DINKES Kota Banjarmasin</p>



**Foto Bersama
Koordinator
Imunisasi
Puskesmas
Pelambuan
Banjarmasin**



**Foto Bersama
Koordinator
Imunisasi
Puskesmas
Kelayan Dalam
Banjarmasin**



**Foto Bersama
Koordinator
Imunisasi
Puskesmas
Pekapuran Raya
Banjarmasin**

Lampiran 15

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Fransiska Dwi Hapsari, S. Kep., Ners
2. Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 03 Desember 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Katolik
5. Alamat Rumah : Jl. Rawasari 12 No.99, Kel. Teluk Dalam,
Kec. Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

B. Riwayat Pendidikan

NO	STRATA	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SD	SDN Angsau 1 Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaihari	2002
2	SMP/MTS	SMPN 1 Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaihari	2005
3	SMA	SMAN 1 Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaihari	2008
4	S1	STIKES Suaka Insan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	2012
5	Profesi	STIKES Suaka Insan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	2013

C. Riwayat Publikasi

NO	JUDUL PENELITIAN
1	The Online Teaching-Learning Of Mental Health In A Nursing Undergraduate Course (2018)
2	Penyuluhan Terkait Kenormalan Baru Atau New Normal pada Masa Pandemi Covid-19 (2020)
3	Pendidikan Kesehatan Tentang Covid-19 Bagi Kelompok Khusus (2020)
4	Skrining Dan Edukasi Penderita Hipertensi (2020)